

EFEKTIVITAS PERAN DINAS SOSIAL

DALAM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN

(Fandhika Al-Khairi; Pradipa Saraswati Annafi'Ah; Najna Ainis Mutiara)

Email: fandhikaalkha16@gmail.com, prdipasaraswati@gmail.com najna.m04@gmail.com

Abstrak

Pengangguran adalah suatu permasalahan yang sejak dulu telah menjadi pembahasan bagi pemerintah Indonesia, banyak faktor yang menjadi alasan mengapa pengangguran masih sulit untuk dituntaskan, bahkan di kota-kota besar pengangguran merupakan hal yang banyak ditemukan, salah satunya di Ibukota Negara kita yaitu DKI Jakarta. Banyak kebijakan yang telah dikerahkan oleh pemerintah untuk menanggulangi pengangguran namun sampai saat ini juga pengangguran masih menjadi permasalahan yang belum juga mereda. Oleh karena itu penelitian ini dibuat untuk menilai efektivitas peran dan fungsi Dinas Sosial dalam menanggulangi pengangguran apakah ada kesalahan dalam program yang dibuat oleh Dinas Sosial atau ada yang salah dalam penerapan program tersebut ke masyarakat. (Penelitian yang kami buat menggunakan metode penelitian empiris) dengan tujuan mengkaji efektivitas peran dan fungsi Dinas Sosial dalam menangani pengangguran, supaya permasalahan pengangguran dapat segera ditanggulangi dengan memperbaiki program Dinas Sosial yang sudah berjalan. Penelitian ini diharapkan supaya menemukan solusi permasalahan pengangguran yang lebih efektif.

Kata kunci: Dinas Sosial, Efektivitas, Pengangguran

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang masuk ke dalam jajaran negara dengan perekonomian terbesar di dunia berdasarkan Gross Domestic Product (GDP). Sedangkan jika ditelaah melalui *gross domestic product based on purchasing power parity* (GDP PPP) Indonesia menempati peringkat ke-7, hal tersebut telah menunjukkan jika Indonesia merupakan negara yang sudah cukup kuat dari

segi perekonomian jika dilihat dari GDP. Namun pada kenyataannya semakin baiknya perekonomian suatu negara tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya, kesenjangan sosial masih tampak jelas di Indonesia terbukti dari tingkat kemiskinan dan pengangguran masih di atas 5%. Dalam periode kedua Presiden Jokowi ini akan mengembangkan kembali rencana penanggulangan pengangguran untuk mencapai visi dan misi yang dicitakan.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2022 tentang tingkat pengangguran terbuka mencatat 5,83% persen pengangguran yang ada di Indonesia, meskipun angka tersebut tidak setinggi pada tahun 2020 dimana angka pengangguran terbuka mencapai 7,27%. Melonjaknya angka pengangguran pada tahun 2020 terjadi karena adanya Covid-19 dimana terjadinya krisis di seluruh dunia, sehingga ada banyak perusahaan yang gulung tikar dan memecat karyawannya supaya dapat survive dari bencana alam tak terduga ini. Dengan adanya faktor ini presiden membuat kebijakan baru untuk kembali menaikkan angka kesejahteraan masyarakatnya, dengan mengeluarkan bantuan sosial dan beberapa kebijakan lainnya. Rencana Kerja presiden Jokowi periode 2019-2024 ini juga berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Salah satu faktor penyebab pengangguran adalah permasalahan yang disebabkan adanya urbanisasi secara besar-besaran saat masa pandemi, dimana banyak para karyawan yang dipecat dari perusahaan kemudian memilih untuk pergi ke kota besar dengan tujuan mendapat pekerjaan untuk memenuhi kehidupan mereka, dengan adanya urbanisasi ini menyebabkan semakin penuhnya kota-kota besar dan habisnya lowongan pekerjaan sehingga angka kemiskinan di Indonesia tidak bisa segera dituntaskan, jika pemberian kebijakan dapat menyebabkan turunnya angka pengangguran dan kemiskinan maka permasalahan sosial ini sudah selesai sejak lama, namun pada kenyataannya tidak semudah itu karena dalam realisasinya tidak

bisa diterapkan dalam seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu peran dinas sosial sebagai pemegang kekuasaan legislatif maka dinas sosial wajib menjalankan kewenangannya untuk mengentaskan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut.

Penelitian yang kami lakukan berdasarkan penelitian sebelumnya sebagai dasar kami menuliskan penelitian ini, oleh karena itu penelitian sebelumnya dibutuhkan untuk menyempurnakan penelitian kami sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang kami bahas. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mohammad Mulyadi (2019) mengenai Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat, yang membahas mengenai hubungan pengangguran dan kemiskinan serta upaya pemerintah dalam mengatasinya.

Pada penelitian yang kami buat, terdapat perbedaan dengan penelitian sejenis terdahulu. Terdapat perbedaan pada tujuan pada penulisan kami. Pada penulisan sebelumnya, membahas mengenai hubungan pengangguran dan kemiskinan, sedangkan pada penelitian kami memuat informasi mengenai faktor yang menjadi angka pengangguran terus meningkat hingga peran dinas sosial dalam menangani kasus pengangguran yang ada. Maka dari itu, perbedaan dalam kedua penulisan terlihat pada fokus yang teliti. Jika penulisan sebelumnya memuat mengenai kemiskinan, maka dalam penulisan kali ini hanya berfokus kepada pemerintah daerah

(dinas sosial) dan masalah yang dihadapi (pengangguran).

Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan solusi bagaimana menekan angka pengangguran
2. Untuk mengetahui apakah kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial sudah tepat atau belum, karena angka pengangguran masih tinggi

Penelitian ini membahas mengenai tentang efektivitas peran dinas sosial dalam penanggulangan pengangguran, yang menggunakan percontohan wilayah DKI Jakarta. Dimana di dalam dinas sosial wilayah tersebut masih belum menyelesaikan permasalahan pengangguran dengan baik. dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan riset dinas terkait dan menjadi solusi atas penanggulangan pengangguran yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian kali ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan pemahaman teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Pemahaman teori dan konsep ini akan dilandaskan melalui data-data yang ada. Data ini digunakan sebagai sumber primer yang menjadi dasar kami

Efektivitas Peran Dinas Sosial (Fandhika, dkk)

melakukan penelitian, selain menggunakan data primer kami juga memanfaatkan penelitian sebelumnya sebagai pembandingan untuk memberikan data sekunder sebagai tambahan data yang akan memberikan penilaian baru di dalam penelitian kami.

PEMBAHASAN

a. Faktor Penyebab Pengangguran Terus Meningkat

Bertambahnya populasi masyarakat di Indonesia menyebabkan bertambahnya kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang mana dalam pemenuhan kebutuhan tersebut dibutuhkan pekerjaan sebagai sarana pemasukan setiap individu, dan pada umumnya pekerjaan banyak ditemukan di kota-kota besar salah satunya seperti DKI Jakarta. Oleh karena itu, sering kali penduduk atau masyarakat yang tinggal di desa memilih untuk merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. karena arus urbanisasi yang semakin meningkat, dan menjadikan angkatan kerja lebih besar dibandingkan kesempatan kerja maka tak bisa dipungkiri bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia semakin menipis, yang akhirnya karena terbatasnya lapangan pekerjaan tersebut menjadi faktor utama meningkatnya angka pengangguran di Jakarta.

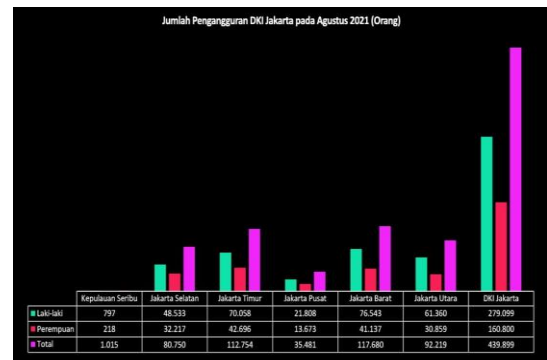
Selain kurangnya lapangan pekerjaan, faktor yang menjadi peningkat angka pengangguran lainnya ialah tingginya harga kebutuhan hidup di Jakarta yang

tidak sebanding dengan upah yang didapatkan masyarakat. Karena pada dasarnya pekerjaan yang didapatkan masyarakat di Jakarta atau kota besar lainnya tidak menutup kemungkinan apabila upah atau gaji yang didapatkan tidak sesuai dengan umur yang berlaku, dan disisi lain harga kebutuhan yang kian melonjak menyebabkan sulitnya terpenuhinya kebutuhan pokok hingga primer masyarakat.

Faktor pelonjakan pengangguran selanjutnya ialah minimnya tenaga kerja terdidik. Yang mana sering kali lapangan pekerjaan yang tersedia membutuhkan tenaga kerja ahli di bidangnya, namun kenyataannya tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat tidak mencukupi sebagai kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan. Sementara itu, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat terjadi bukan tanpa alasan, tetapi terjadi dikarenakan kurangnya ekonomi masyarakat itu sendiri. Karena biaya pendidikan yang semakin hari semakin tinggi, terlebih lagi untuk menempuh pendidikan ke perguruan tinggi.

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat beberapa waktu lalu menjadi salah satu faktor terbesar saat ini dalam peningkatan pengangguran di Jakarta. sesuai dengan data yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Covid-19 menyebabkan bertambahnya pengangguran sebanyak

175.890 pekerja. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya produktivitas akibat PPKM, juga hilangnya pekerjaan karena perusahaan yang melakukan PHK masal akibat perusahaan yang terdampak Covid-19.



Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Namun, berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2020 khususnya bulan Agustus, pengangguran di DKI Jakarta mengalami penurunan hingga mencapai 572.780 orang, lalu TPT mencapai 10,95%. Kemudian, dengan seiring berjalannya waktu, Provinsi DKI Jakarta terjadi pemulihan ekonomi hingga membuat jumlah pengangguran juga TPT DKI Jakarta menjadi menurun sampai menyentuh angka 439,899, dan TPT 8,50%

b. Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi Pengangguran

Sebagai implementasi dari pemerintahan pusat yang bertanggung jawab atas kehidupan yang layak bagi

masyarakatnya, maka adanya dinas sosial di setiap daerah adalah membantu pemerintah untuk bisa merealisasikan visi dan misinya. Pengangguran adalah polemik lama yang selalu menjadi masalah berkepanjangan, karena setiap tahunnya selalu menjadi pembahasan. Hal ini menunjukkan jika pengangguran adalah permasalahan lama yang belum juga usai. Dalam 5 tahun terakhir upaya yang telah dilakukan Dinas sosial untuk mengentaskan pengangguran cukup memberikan hasil yang memuaskan. Terbukti setelah adanya Program Perluasan dan Pengembangan Lapangan Kerja (PPPK) sangat membantu Dinas Sosial untuk mengentaskan pengangguran.

Dinas Sosial bersama dengan PPPK bersama-sama membuat kesempatan kerja baru bagi pengangguran, seperti membuka program padat karya, meskipun hanya bersifat sementara namun setidaknya program padat karya dapat memberikan motivasi kerja bagi para pengangguran, karena salah satu faktor tingginya pengangguran adalah kurangnya motivasi untuk bekerja, oleh karena itu dengan adanya program padat karya diharapkan mampu memotivasi dan memberikan pengalaman baru bagi para pekerjanya. Program padat karya ini memang tidak berlangsung hingga selanjutnya, namun dengan adanya program padat karya ini dapat membantu mengentaskan pengangguran, meskipun hanya sementara.

Selain menjalankan program Padat Karya upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dengan membuka Pelatihan dan Sosialisasi bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk pelaksanaannya. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat dikatakan cukup rendah. Hal ini ditunjukkan melalui data dari BPS bahwa angka buta huruf yang cenderung masih tinggi dan angka pendidikan yang masih rendah. Hal tersebut yang membuat Dinas sosial memilih untuk membuka pelatihan bagi orang-orang yang memiliki motivasi untuk bekerja namun terhalang dengan latar belakang pendidikan yang kurang memadai.

Karena selain dampak kemiskinan yang terjadi akibat pengangguran ini adalah angka pengemis akan semakin tinggi, dan tersebut secara tidak langsung menunjukkan jika pemerintah tidak dapat memberikan lapangan kerja yang layak bagi rakyatnya, atau pemerintah tidak mampu memberikan pendidikan yang pantas bagi rakyatnya. Oleh karena itu Pemerintah membentuk program kerja untuk menanggulangi pengangguran melalui Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Alasan Pengangguran ini selalu menjadi polemik yang belum ada habisnya adalah karena pandemi covid-19 yang kemarin hampir membuat angka pengangguran melonjak tajam, juga karena permasalahan pendidikan yang belum memadai.

Lapangan kerja yang tersedia cenderung menerima orang-orang yang pendidikannya mereka butuhkan, dan tidak sedikit prosedur penerimaan atau seleksi penerimaan kerja yang dibuat rumit membuat banyak rang yang terlanjur enggan untuk mendaftar karena anggapan pendaftaran yang rumit tersebut. Selain itu kesadaran dari masyarakat juga belum tumbuh dengan maksimal yang menyebabkan begitu banyak orang yang menyepelekan pendidikan dan pentingnya bekerja.

c. Kebijakan Dinas Sosial

Suatu kebijakan hanya dibuat untuk menjelaskan atau memberi suatu kejelasan terhadap peraturan yang sudah ada, serta kegunaan dari kebijakan sendiri adalah untuk mengarahkan masyarakat atas peraturan yang ada. Kemudian tugas aparatur pemerintah adalah memastikan bahwa masyarakat paham dan mengerti atas peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu kebijakan Dinas Sosial yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja no 38 tahun 2015 tentang pelatihan. Dalam Prakteknya Surat Keputusan tersebut sudah terlaksana dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali, seperti pelatihan yang dilaksanakan, penyebaran informasi, dan pembukaan pelatihan. Karena meskipun sudah terlaksana dengan baik, tidak menutup kemungkinan

masyarakat yang terjaring belum banyak, hanya beberapa dan belum bisa memenuhi target Dinas Sosial untuk memberikan pelatihan. Oleh karena itu meskipun telah mengeluarkan kebijakan bukan berarti tugas dari dinas sosial selesai, karena masih ada beberapa hal yang perlu diurus.

d. Evaluasi Atas Kebijakan Dinas Sosial

Dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan untuk mengentaskan pengangguran, Dinas Sosial cenderung tidak bersifat terbuka dalam menyebarkan akses informasi, karena banyak dari masyarakat yang belum mengetahui adanya pelatihan kerja yang dibuka oleh Dinas Sosial. Kurangnya keterbukaan informasi oleh Dinas Sosial ini mengakibatkan banyak masyarakat yang menginginkan bergabung dalam pelatihan menjadi malas untuk bergabung karena sudah tertinggal. Selain itu pencapaian sasaran Dinas Sosial tidak akan tercapai karena tidak bisa menjaring banyak orang. Perlu adanya perbaikan di dalam struktur organisasi Dinas Sosial supaya penyebaran informasi dapat dilakukan dengan maksimal sehingga dapat sampai ke masyarakat secara luas. Perlu adanya perubahan sistem agar masyarakat lebih tau mengenai program-program yang sedang dijalankan oleh dinas sosial.

Selain perubahan sistem, perlunya ada perbaikan kualitas pelayanan juga penting, karena tugas utama pemerintah adalah melayani rakyatnya, jika tidak mampu memperbaiki pelayanan kemungkinan

ketidakpuasan akan dirasakan oleh masyarakat dan menyebabkan kritik pada Dinas Sosial, hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi Dinas Sosial oleh karena itu dibutuhkannya perbaikan sistem dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dengan sistem transparansi tersebut akan memberikan dampak positif bagi masyarakat karena secara langsung masyarakat akan merasa diperhatikan oleh negara. Disisi lain transparansi tersebut juga akan membantu pencapaian atas target sasaran Dinas Sosial, dan mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga kinerja dari Dinas Sosial akan dianggap baik, serta keberadaan Dinas Sosial ini akan dianggap dibutuhkan untuk keberlangsungan program kerja selanjutnya. Kemudian jika dengan kebijakan tersebut mampu memberikan perubahan yang signifikan tentu akan membuat angka pengangguran dan angka kemiskinan akan berkurang, hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial.

e. Cara Penanggulangan Pengangguran

Untuk menekan angka pengangguran Dinas Sosial perlu adanya program yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan konsisten. Program tersebut diharapkan nantinya dapat menekan angka pengangguran. Dalam pelaksanaan program-program tersebut dapat memanfaatkan anggaran yang berasal dari APBN maupun APBD. Program yang akan dilaksanakan tentunya memerlukan adanya

sedikit perubahan pada sistem agar tercipta keefektifan dalam pelaksanaannya. seperti contoh pembuatan program yang dibarengi dengan melakukan promosi dengan cara membuat iklan di media massa maupun media cetak atau bisa juga dengan menggunakan influencer atau publik figur yang dimana mereka mengiklankan program dinas sosial menggunakan platform mereka masing-masing. Sehingga diharapkan masyarakat yang menjadi target untuk program dinas sosial mengetahui bahwa mereka akan terbantu dan mengikuti program tersebut.

Dalam merealisasikan program yang dilakukan secara konsisten Dinas Sosial dapat mengembangkan program yang dilaksanakan oleh dinas sosial Kota Jakarta Barat. Kegiatan tersebut yang bernama Usaha Ekonomi Produktif, atau bisa disingkat dengan UEP dan kelompok Usaha Bersama, atau yang disingkat dengan KUBE yang dilakukan bagi keluarga tidak mampu atau miskin yang mana bantuan stimulan ini berupa uang yang diambil dari dana APBN dan APBD. Secara teknis KUBE dan UEP ini di programkan oleh Dinas Sosial melalui suku dinas sosial dimana dana ini diberikan kepada keluarga kurang mampu yang memiliki sebuah keterampilan ataupun memiliki kemauan untuk merubah status hidupnya. Hal tersebut menjadikan program ini sebagai jembatan untuk menjadikan masyarakat yang lebih produktif.

Kaitannya dengan menekan angka pengangguran Dinas Sosial juga bisa mengimplementasikan program diatas yaitu dengan cara UEP dan KUBE. dengan adanya kedua program tersebut masyarakat yang tadinya tidak menganggur bisa memperoleh kesibukan dan menaikkan derajat hidupnya. dengan mengimplementasikan program tersebut dinas sosial juga perlu memberi target siapa saja yang berhak mendapatkan kemanfaatan dari program tersebut. sebagai contoh hanya masyarakat yang sudah memiliki KTP DKI Jakarta saja yang bisa memperoleh program tersebut. hal tersebut dilakukan agar tidak banyak lagi pendatang pencari kerja menuju DKI Jakarta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tingginya angka pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan masyarakat yang tidak dibarengi oleh pertumbuhan lapangan kerja. Lapangan kerja yang tersedia terbatas dan memiliki kriteria yang cukup sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat umum, sehingga banyak masyarakat yang gugur dalam seleksi. Selain itu adanya Covid-19 juga menyebabkan banyak pegawai yang di PHK secara serentak membuat angka pengangguran melonjak tajam.

Dinas Sosial yang dibentuk oleh pemerintah di harapkan mampu memberikan bantuan untuk mengatasi pengangguran dengan beberapa program, meskipun selama ini angka pengangguran tidak kunjung turun, namun pembaharuan kebijakan dan sistem di dalam

Dinas Sosial akan memberikan dampak positif pada angka pengangguran di Indonesia.

Atas dasar perolehan yang terjadi, kami sebagai penulis memiliki saran kepada Dinas Sosial dalam rangka menekan angka pengangguran ialah bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan agar membuat kebijakan berupa pelatihan bersertifikat, yang mana sertifikat tersebut dapat digunakan untuk memudahkan mendapatkan pekerjaan disuatu instansi maupun pembuka lapangan kerja lainnya, serta kebijakan kepada instansi perusahaan maupun pembuka lapangan kerja lainnya untuk memberikan kuota kesempatan dalam penerimaan karyawan baru yang memiliki sertifikat dari pelatihan yang diadakan dinas sosial yang bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dampak Covid-19, Pengangguran DKI Jakarta Tembus Dua Digit. <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/493/dampak-covid-19--pengangguran-dki-jakarta-tembus-dua-digit.html> diakses pada tanggal 18 November 2022
- Sukanti, Dwi. 2018. Institut Agama Islam Negeri Metro. Penyebab Tingginya Angka Pengangguran di Kota Metro.
- Adila. 2019. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran Di Kota Jambi, UIN Sutha Jambi
- Nurmalisa, Siti. Kinerja Suku Dinas Sosial Dalam Menekan Angka Pengemis dan Gelandangan Di Kota Administrasi

Lontar Merah Vol. 7 Nomor 2 (2024)
E-ISSN : 2829-2464

Efektivitas Peran Dinas Sosial (Fandhika, dkk)

Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri